

ABSTRAK

PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS WAJIB PAJAK PENGHASILAN BADAN PPh PASAL 25 TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAKNYA (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya)

Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar dan sangat penting dalam suatu Negara adalah sektor pajak. Dituntut kesadaran warga Negara sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-undang perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan system ini ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Otoritas pajak sebagai sumber penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak memiliki kewenangan untuk menguji sejauh mana Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satu wujud kewenangan tersebut ada dalam bentuk pemeriksaan pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya peranan pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25 terhadap pemenuhan kewajiban pajak dan untuk mengetahui besarnya peranan pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25 terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.

Objek penelitian yang digunakan adalah data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya mengenai Wajib Pajak PPh Badan Pasal 25. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Rumusan hipotesis yang digunakan adalah:

H0 : pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25 tidak berperan secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya.

H1 : pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25 berperan secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian dengan menggunakan SPSS 12 dapat menetapkan tingkat signifikansi alpha 0.05 dan dapat diketahui sebesar 1.000. Jadi hipotesis yang diajukan penulis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berperan secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25.

Untuk mengatasi kelemahan, penulis menyarankan agar Kantor Pelayanan Pajak Pratama khususnya meningkatkan pelaksanaan pada strategi ekstensifikasi yaitu mencari Wajib Pajak yang tersembunyi daripada strategi intensifikasi seperti pemeriksaan dan petugas pemeriksa pajak diharapkan dapat terus memperbaiki mutu kinerja maupun profesionalismenya agar dapat dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Rerangka Pemikiran.....	6
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1. Alat Uji	10
1.7 Lokasi Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pemeriksaan	13
2.1.1 Menurut Alvin A.Arens dan James K.Loebbecke	13
2.1.2 Menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SAP).....	14
2.1.3. Menurut Undang-Undang Perpajakan	16
2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak	17

2.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan	19
2.4 Norma Pemeriksaan Pajak	20
2.4.1 Norma Pemeriksaan Pajak.....	20
2.4.2 Norma Pelaksanaan Pemeriksaan	23
2.5 Pedoman Pemeriksaan Pajak	26
2.6 Pelaksanaan Pemeriksaan	28
2.6.1. Pasal 12	28
2.6.2. Pasal 13	29
2.6.3. Pasal 14.....	31
2.6.4. Pasal 15.....	32
2.6.5. Pasal 16.....	33
2.7. Jenis-Jenis Pemeriksaan	34
2.7.1. Secara Umum Menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).....	34
2.7.2. Menurut Peraturan Perpajakan	35
2.8. Tinjauan Mengenai Pajak	37
2.8.1. Pengertian Pajak.....	37
2.8.2. Fungsi-Fungsi Pajak.....	38
2.8.3. Jenis-Jenis Pajak	39
2.9. Pajak Penghasilan	40
2.9.1. Pengertian Pajak Penghasilan	40
2.9.2. Pengertian Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	42
2.9.3. Subjek Pajak Penghasilan.....	43
2.9.4. Objek Pajak.....	46

2.10. Kepatuhan Wajib Pajak	47
-----------------------------------	----

BAB III OBJEK DAN METODA PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian	51
3.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.....	52
3.1.1.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya	52
3.1.1.2. Aktivitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya ...	57
3.1.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya	58
3.1.1.4 Keadaan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya	65
3.1.1.5. Sarana dan Prasarana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya	67
3.1.2. Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya	68
3.1.3. Prosedur Penyampaian SPT Tahunan	69
3.1.4. Pengawasan SPT Tahunan	69
3.1.5. Pemeriksaan SPT Tahunan	70
3.2. Metode Penelitian	71
3.2.1. Variabel Penelitian	73
3.2.2. Metode Pengumpulan Data	76
3.2.3. Metode Pemilihan Objek	77
3.2.4. Hipotesis Penelitian	78
3.2.5. Uji Statistik	78

3.2.5.1. Tahap SPSS	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	80
4.1.1. Hasil Penelitian Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas PPh	
Pasal 25 Wajib Pajak Badan Pada	
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya	80
4.1.1.1. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak	85
4.1.1.2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	87
4.1.1.3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak	96
4.1.2. Hasil Pengumpulan Data Penelitian	99
4.1.2.1. Hasil Pengujian Hipotesis	99
4.2. Pembahasan	103
4.2.1. Kelemahan Penelitian	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	106
Daftar Pustaka	ix
Lampiran	